



LAPORAN AKHIR

TELAAH SISTEM TERPADU PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

(KEBIJAKAN, STRATEGI DAN OPERASI)



BUKU 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada tahun 2004 dan 2005, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

- (1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
- (3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih akan dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan. Sementara proses pengembangan kebijakan sedang berlangsung, proses lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka dipandang perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan yang

terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Atas dasar inilah kegiatan kajian dilaksanakan.

B. TUJUAN TELAHAAN

Tujuan dilakukannya Telahaan ini adalah:

- a. Melakukan *review* terhadap sistem nasional penanggulangan bencana.
- b. Melakukan *review* kerentanan dan dampak bencana di daerah.
- c. Menelaah efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tingkat nasional dan daerah.
- d. Memberikan masukan/rekomendasi kebijakan strategi dan kegiatan penanggulangan bencana.

C. KELUARAN TELAHAAN

Adapun keluaran telahaan adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen kajian kebijakan untuk penanggulangan bencana.
- b. Tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk peningkatan sistem penanggulangan bencana.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam pelaksanaan Telahaan, maka ruang lingkup kegiatan dan hasil pelaksanaan pekerjaan terbatas pada :

- a. Mengkaji berbagai metodologi yang digunakan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.
- b. Melakukan survei terhadap efektifitas pelaksanaan masing-masing sistem.
- c. Menyusun rekomendasi terkait dengan sistem penanggulangan bencana.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kajian.
- e. Menyampaikan hasil kajian melalui *seminar/workshop* ke berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.